

KONFLIK POLITIK DI KESULTANAN PALEMBANG (1804-1821)

Oleh: Dra. Farida M.Si
Dosen FKIP Universitas Sriwijaya

Abstrak:

Permasalahan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana konflik antara Kesultanan Palembang dan Inggris, Belanda pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin II?” Dengan metode penulisan sejarah. Sebagai Kesultanan yang telah berdiri selama satu setengah abad dengan kelebihan sebagai penghasil lada dan timah yang potensial, menempatkan Palembang menjadi incaran kaum kolonialis Inggris dan Belanda. Akibatnya Palembang dihadapkan dengan berkali-kali konflik, baik yang disebabkan oleh faktor intern (perebutan kekuasaan) maupun faktor ekstern (Inggris dan Belanda). Kondisi inilah yang membawa Kesultanan Palembang kehilangan kedaulatannya.

Kesultanan Palembang berdiri pada masa pemerintahan Sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1702). Sebelumnya berbentuk kerajaan yang muncul pada abad XVI di bawah pimpinan Ki Gede Ing Suro.

Setelah masa pemerintahan Sultan Abdul Rahman, terjadi pergantian kekuasaan beberapa kali. Sultan Abdul Rahman digantikan oleh puteranya yaitu Sultan Muhammad Mansur (1702-1714). Sultan Muhammad Mansur menyerahkan kekuasaan kepada adiknya yang bergelar Sultan Komaruddin (1714-1724). Pengganti Komaruddin adalah Sultan Machmud Badaruddin I (1724-1757). Pasca masa Sultan Machmud Badaruddin I berkuasa, maka berturut-turut yang menjadi sultan adalah Ahmad Najamuddin I (1757-1776), diikuti oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1804) dan Machmud Badaruddin II (1804-1821).

Sultan Machmud Badaruddin II (selanjutnya disebut Badaruddin II) menerima tahta dari ayahandanya Sultan Muhammad Bahauddin pada awal awal abad XIX. Pada masa ini secara politik kondisi Palembang cukup stabil, begitu pula kondisi ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah makin maraknya “perdagangan bebas” seiring dengan makin lemahnya *Vereenigde Oost Indische Vompagnie* (VOC)¹. Dampak positifnya bagi Kesultanan Palembang adalah makin kayanya kerajaan ini (ekspor gelap Palembang ke Makau (Cina) mencapai 20.000 pikul

¹ Hubungan resmi pertama antara Palembang dan VOC terjadi pada tahun 1641, ditandai dengan diperbolehkannya VOC berdagang di Palembang. Kontrak ini diperbaharui pada tahun 1642 yang menetapkan VOC berhak atas monopoli perdagangan lada di daerah ini. Timah ditemukan di Bangka tahun 1710 dan tahun 1722 diperbaharui kontrak dengan isi, VOC berhak memonopoli timah (Ricklefs, 2005: 154 dan 157; Woelders, 1975: 75-80; Kielstra, 1892:79; Faille,1971: 28).

lada dan 27.655 pikul timah, sedangkan dengan pemerintah Belanda pada tahun 1800 hanya sebanyak 5000 pikul untuk masing-masing lada dan timah (1 pikul = 61,76kg) (Woelders, 1975: 75-85; Veth, 1869: 657).

Pada awal masa pemerintahan Badaruddin II, di Hindia Belanda sedang terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Kondisi ini merupakan akibat konstelasi di Eropa². Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels Tahun 1808-1811, ia banyak melakukan perubahan terhadap daerah-daerah kekuasaannya, termasuk Palembang. Terhadap Palembang, ia merubah bentuk perdagangan monopoli yang selama ini berjalan lancar dengan sistem pembayaran kontan, dirubah dengan cara hutang atau barter dengan beras, bahkan harga timah akan diturunkan. Apabila menolak, maka Palembang akan diserang. Inilah kondisi hubungan Palembang dengan pemerintah kolonial Belanda sampai kejatuhan Belanda di tangan Inggris tahun 1811 (Woelders, 1975: 85-6).

Bagi Inggris, Palembang begitu penting karena letaknya yang strategis antara Jawa dan semenanjung Malaya (Pulau Penang), juga penghasil timah, lada dan produk dagang lainnya. Untuk itu Thomas Stamford Raffles membujuk Badaruddin II untuk mengusir Belanda dari Palembang sebelum Inggris menaklukkan Batavia. Raffles dari tahun 1810 hingga tahun 1811 beberapa kali

melakukan korespondensi dengan Badaruddin II, bahkan sempat mengirimkan senjata beserta amunisinya (Kielstra, 1892: 81).

Badaruddin II memahami keinginan Inggris tersebut dengan caranya sendiri dengan menyiapkan mata-mata guna mengetahui secara pasti posisi Inggris di Jawa. Kondisi ini dipermudah karena hubungan Badaruddin II dengan Belanda sebelumnya memang sudah buruk. Setelah yakin Batavia jatuh ke tangan Inggris (26 Agustus 1811). Sultan mengirim utusan terdiri yang dari golongan bangsawan untuk mengusir Belanda dari loji Sungai Aur (14 September 1811). Keinginan ini ditolak Residen Jacob Groenhof van Woortman dengan alasan tidak ada perintah dari pusat (Batavia). Langkah selanjutnya yang diambil para bangsawan itu adalah menguasai loji dan mengusir semua orang yang tinggal di loji. Mereka dibawa keluar sungai Musi. Di daerah muara Sungai Musi (Sunsang) mereka dibunuh (24 orang Belanda dan 63 orang Jawa). (Woelders, 1975: 88; Ricklefs, 2005: 300; Kemp, 1898: 255).

Setelah peristiwa di atas maka Palembang menjadi kesultanan yang berdaulat. Badaruddin II menolak menempatkan Inggris sebagai pengganti Belanda di Palembang. Raffles marah mendengar hal ini, ia merancang suatu penaklukan atas Kesultanan Palembang yang diwujudkan pada tahun 1812. Sejak itu di Kesultanan Palembang terjadi konflik dan menempatkan kesultanan ini secara bergantian di bawah kekuasaan Inggris dan Belanda.

Konflik di Kesultanan Palembang melibatkan dua negara imperialis besar di Asia. Peristiwa ini sangat penting baik bagi Kesultanan Palembang maupun

² Ketika Perancis berperang melawan Inggris, sementara Perancis telah menduduki Belanda dengan mendirikan Republik Bataaf tahun 1795. Penguasa Belanda melarikan diri ke Inggris dan mengeluarkan ketentuan agar koloni-koloni Belanda di Timur diserahkan kepada Inggris (Djoko Marihandono, 2005: 9-13).

bagi Belanda dan Inggris. Menurut Coser, konflik adalah salah satu bentuk dasar interaksi sosial, yang merupakan gejala alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sosial (Ritzer & Douglas J. Goodman, 2004:90,158-160).

Dari uraian di atas, maka permasalahan dalam kajian ini adalah "Bagaimana konflik antara Kesultanan Palembang dan Inggris, Belanda pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin II?" Tujuan untuk mengetahui jalannya konflik politik di kesultanan ini dengan menggunakan metode penulisan sejarah.

Pendudukan Inggris

Langkah yang diambil oleh Raffles untuk menaklukkan Palembang adalah menyiapkan pasukan tempur di bawah komando Robert Rollo Gillespie pada bulan 19 Maret 1812 guna menghukum sultan Badaruddin II, dalam rangka menjaga martabat Inggris (Java Gouvernement Gazette, Sabtu 30 Mei 1812). Menyadari konsekuensi dari penolakannya maka Badaruddin II bersiap diri dengan mendirikan benteng-benteng di sungai Musi. Persiapan ini tidak banyak artinya ketika Inggris menyerang Palembang pada 20 April 1812 dan harus tunduk pada Inggris. Salah satu faktornya adalah akibat penghianatan adiknya sendiri yaitu Pangeran Dipati³. Ini dipicu oleh hubungan keduanya yang kurang

harmonis sejak orangtua mereka masih hidup. (Sevenhoven, 1971: 102-03). Pangeran Dipati yang seharusnya mempertahankan benteng terdepan di pulau Borang tidak melakukan perlawanan terhadap serangan Inggris, sehingga pusat pemerintahan sultan dengan mudah dapat diduduki. Badaruddin II mundur ke pedalaman (dusun Buaya Langu) setelah sebelumnya mengirim keluarga dan harta kekayaan sekaligus pusaka kerajaan ke pedalaman (Blida). Pada tanggal 14 Mei 1812 Badaruddin II diturunkan dari tahta dan tiga hari berikutnya Inggris mengangkat Pangeran Dipati sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (selanjutnya disebut Najamuddin II). Naiknya Najamuddin II sebagai sultan karena bersedia memenuhi tuntutan Inggris untuk melepaskan Bangka, Belitung dan pulau-pulau lainnya kepada Inggris. Kemudian Kapten Meares diangkat menjadi residen Bangka dan Palembang (Woelders, 1975: 8; Kielstra, 1892 : 82; Kemp, 1898: 255).

Setelah Pangeran Dipati diangkat menjadi sultan Palembang, dari pedalaman, Badaruddin II melakukan blokade pengangkutan bahan pangan dan komoditi dagang ke ibukota sehingga kondisi keamanan menjadi terganggu (Stapel, 1940: 98). Untuk membantu sultan baru, pada tanggal 28 Agustus 1812 Kapten Meares bersama semua pasukan yang ada di Bangka dan Palembang berangkat menyerang Buaya Langu guna menghancurkan kekuatan Badaruddin II. Tempat ini berhasil ditaklukkan, tetapi Kapten Meares terluka berat karena tertembak dalam peperangan tersebut dan meninggal di Muntok. Badaruddin II mendapatkan kesempatan untuk

³ Pangeran Dipati (nantinya bergelar Ahmad Nayamuddin II) adalah satu dari tiga adik Sultan Mahmud Badaruddin II yang mendapat limpahan kasih sayang dari ayahnya (Sultan Muhammad Bahauddin) akan tetapi kekuasaan jatuh pada Badaruddin sebagai putra mahkota (secara umum di Kesultanan Palembang berlaku suksesi kekuasaan kepada Putera Mahkota dengan gelar Pangeran Ratu). Hal ini menimbulkan perasaan sakit hati pada dirinya (Woelders, 1975: 91-2).

mundur ke Muara Rawas dan memperkuat diri di sana. (Kielstra, 1892: 83).

Dengan mundurnya Badaruddin II ke daerah *uluan*, maka terdapat dua kekuasaan yang saling bertentangan, yaitu Badaruddin II yang berkuasa di *uluan* yang mendapat dukungan dari rakyat *uluan*, didukung oleh kekayaan dan pusaka kerajaan yang ada di tangannya, dengan Najamuddin yang tidak pernah memerintah sebelumnya, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki pusaka dan tidak mendapat dukungan dari sebagian besar golongan bangsawan dan rakyat. Melihat besarnya pengaruh Badaruddin II di *uluan* yang dapat mengganggu posisi Inggris di Palembang, maka Mayor William Robison (pengganti Kapten Meares) selaku Residen Palembang dan Bangka pada waktu itu membuat kebijakan mendekati Badaruddin II dan Badaruddin II melakukan hal yang sama. Pada tanggal 25 Juni 1813 Badaruddin mengirimkan uang sebesar seratus real Spanyol kepada William Robison sebagai hadiah, maka terjadilah kesepakatan antarkeduanya pada tanggal 29 Juni 1813. Badaruddin II kembali naik tahta sebagai sultan tua (Juli-Agustus 1813). Najamuddin II terpaksa menerima penurunan tersebut atas desakan William Robison. Ekspedisi yang ia kirimkan ke Rawas tidak membuahkan hasil karena pada saat pelaksanaannya rakyat menolak perang melawan pasukan Badaruddin II (Kielsra, 1892: 83-4; Stapel, 1940: 98).

Kebijakan ini ditolak Raffles sebab Mayor William Robison bertindak sendiri dengan mengabaikan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Inggris di Batavia mengirim ekspedisi militer dan tiba di Palembang pada 13 Agustus 1813 dan keesokan

harinya dibacakan pengumuman Raffles tentang diturunkannya Badaruddin II dan Najamuddin II naik tahta kembali sebagai sultan. Sementara itu Mayor William Robison dipecat. Hal ini juga disebabkan William Robison dituduh terlibat masalah keuangan. Walaupun Badaruddin II terpaksa menerima keputusan tersebut tetapi ia menolak melepaskan pusaka kerajaan, sehingga penguasa pada waktu itu menekannya dan menempatkan Badaruddin II di keraton Kuta Lamo⁴.

Pusaka adalah benda-benda lambang kekuasaan seorang raja. Pusaka dianggap mendukung setiap sultan yang secara sah memerintah seluruh kerajaan. Pusaka juga berfungsi sebagai tanda pemberian mandat kepada pembawa atau penerimanya. Maka untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya biasanya seorang raja akan mengumpulkan pusaka di keraton. Benda-benda yang berupa tombak, keris, atau bendera ini biasanya dikramatkan (Selosoemardjan, 1962: 17-18; Moedjanto dalam Antlo, Sven Cederroth, 2001: XXI). Betapa penting arti keberadaan benda-benda pusaka itu. Hilang pusaka berarti hilang pula kekuasaan. Dalam kaitannya dengan Kesultanan Palembang, pada saat Palembang diserang Inggris tahun 1812, maka Badaruddin II mengirimkan pusaka kerajaan ke pedalaman (Blida). Berpindah pusaka kerajaan berarti berpindah pula kekuasaan. Hal ini menunjukkan kesiapan Badaruddin II untuk melanjutkan perjuangan di daerah *uluan*. Pusaka Kesultanan Palembang itu berupa: Keris, *Pedang Hulu Kencana*, Tombak, *Tunggul Tulis*

⁴ Di Kesultanan Palembang terdapat dua keraton, yaitu *Kuta Lamo* (keraton yang lebih tua) dan *Kuta Besak*. (Woelders, 1975, 95-96)

Perada, Tunggul Payung (payung kerajaan), *Bedil Seri Padah, Palembang*, Cap Stempel Sultan Machmud Badaruddin II (Woelders, 1975: 91,130, 184; Syair Perang Menteng dalam Woelders, 1971: 211-2).

Residen Inggris Mayor M.H. Court berhasil memulihkan ketenangan di Palembang sampai Belanda berkuasa kembali (1816). Meskipun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Inggris dan Najamuddin II tetapi Badaruddin II tetap tampil penuh wibawa. Najamuddin II tidak mampu melebihi saudaranya (Badaruddin II) dalam hal ketegasan sikap, ketajaman berpikir dan keahlian dalam berunding. Sarana dan pengaruh yang dimiliki Badaruddin II mempersulit pemerintahan Najamuddin II. Badaruddin II mendapat dukungan besar dari rakyat Palembang, sekaligus memiliki kekayaan yang besar yang diperoleh dari perdagangan (timah, lada, produk hutan dan perkebunan lainnya, juga hasil dari pajak) (ANRI, Bundel Palembang No. 70.3).

Traktat London dan konflik antara Inggris dan Belanda

Traktat London (13 Agustus 1814) menyebutkan bahwa Belanda berkuasa kembali di Hindia Belanda. Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Inggris John Fendall, menuntut agar Belanda menjamin kontrak-kontrak yang telah dibuat Inggris dengan raja-raja pribumi. Hal ini berarti Belanda harus menjamin kontrak Inggris dengan sultan Palembang yaitu tentang penyerahan Bangka, Belitung dan pulau-pulau disekitarnya. Atas dasar inilah Inggris menunda penyerahan Bangka, karena menurut versi Inggris, mereka membuat perjanjian dengan Sultan Nayamuddin II yang pada waktu itu berstatus merdeka. Sementara Belanda

bersikukuh dengan kontrak yang dahulu dibuat mereka dengan sultan-sultan Palembang sejak Tahun 1641-1791. Masalah ini memaksa mereka membawa kasus ini kepada pemerintah negara masing-masing di Eropa⁵.

Konflik di atas semakin nyata di bawah Raffles yang pada waktu itu berkuasa di Bengkulu sejak Maret 1818. Ia berusaha keras untuk memperluas pengaruh Inggris di luar Bengkulu yang berarti mengancam kedudukan Belanda di Palembang. Raffles mengirimkan pasukan pada Juni 1818 atas undangan Najamuddin II yang waktu itu merasa terdesak oleh kehadiran Herman Warner Muntinghe. Raffles juga melakukan protes tertulis yang dilancarkan kepada Muntinghe (12 Agustus 1818) dan mengeluarkan pengumuman pada tanggal 1 September 1818, yang menuduh Muntinghe melakukan pemalsuan (Perjanjian yang ditandatangani pada 23 Juni 1818 dianggap tidak sah, karena yang menandatangani bukan Najamuddin II tetapi Pangeran Dipati). Raffles juga menulis di koran-koran India bahwa Belanda pengecut dan melanggar Traktat London 1814 pasal 2 (Stapel, 1940: 156,169-72). Itulah sebabnya

⁵ Traktat London tahun 1814 pasal 2 menyebutkan bahwa Bangka yang telah dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan kepada Belanda, sebagai gantinya Inggris menerima Cochin yang berada di wilayah India dan wilayah-wilayah lain di sekitar pantai Malabar. Pulau Belitung tidak termasuk dalam pasal 2 tersebut, maka M.H. Court (Residen Bangka-Palembang) menganggap Belitung tetap milik Inggris. Pendapat ini didukung oleh John Fendall, dipihak lain Komisaris Jenderal Belanda mendukung penuh kembalinya Bangka Belitung ke tangan mereka. Masalah Belitung berlarut-larut antara dua pemerintahan, baru dapat diselesaikan melalui Traktat London 1824 (Kemp, 1898: 256; Stapel, 1940: 155-6).

Raffles memanfaatkan setiap kesempatan untuk mewujudkan impiannya menguasai Palembang (*Bataviaasch Courant*, 26 Juni 1819, nomor 26, hal. 2).

Langkah lanjut yang dilakukan oleh Belanda adalah mengangkat, Klaas Hejnis diangkat sebagai residen Belanda untuk Palembang dan Bangka pada bulan Nopember 1816. Salah satu tugasnya adalah meredakan ketegangan antara kedua sultan yang selalu bertikai. Akan tetapi usahanya belum menampakkan hasil, karena ia segera digantikan oleh Dewan Keuangan yang terdiri dari N. Coop-a-Groen dan J. Du Puy pada bulan 13 Juni 1817. Empat bulan kemudian Dewan Keuangan digantikan oleh Muntinghe (Ketua Dewan Keuangan dengan jabatan Komisararis di Palembang) dan ia melakukan pengambilalihan kekuasaan di Muntok (Mentok) pada 20 April 1818. Tugas Muntinghe adalah mengukuhkan kekuasaan Belanda atas Palembang dan Bangka sekaligus mencegah perpecahan lebih lanjut antara Najamuddin II dengan Badaruddin II dengan cara membagi kekuasaan di antara mereka. Walaupun secara resmi kekuasaan berada di tangan Najamuddin II untuk seluruh wilayah Kesultanan Palembang dan berkedudukan di ibukota, tetapi kenyataannya ia hanya memiliki kekuasaan yang kecil, dan tidak memiliki kemampuan sekaligus sarana yang dapat menunjang kelancaran pemerintahannya. Berbanding terbalik dengan saudaranya Badaruddin II. (ANRI, Bundel Palembang No. 70.3).

Setiba Muntinghe di Palembang pada bulan Juni 1818, ia menyodorkan perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua sultan tersebut, yang intinya bahwa “sebagian besar wilayah kesultanan Palembang diserahkan

kepada Belanda” (wilayah pesisir dan pedalaman), sedangkan mereka hanya memperoleh sebagian kecil wilayah untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Badaruddin II menandatangani perjanjian tersebut pada 21 Juni 1818. Najamuddin II menolak, karena ia harus membagi kekuasaan dengan Badaruddin II (disebut Sultan Tua dan Najamuddin II disebut Sultan Muda), sekaligus kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaan. Akhirnya dengan paksaan Najamuddin II menerima dua hari berikutnya (ANRI, Bundel Palembang No. 70.3).

Sementara itu Raffles yang berkedudukan di Bengkulu berpendapat harus memperhatikan kepentingan Inggris di seluruh Sumatera dan sekitarnya. Raffles menentang pemulihan kekuasaan Belanda, tidak hanya di Lampung dan di Minangkabau, tetapi juga di Borneo Barat dan Riau. Sehubungan dengan Palembang, Raffles menganut pandangan bahwa wilayah ini berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Sultan Najamudin II, menempatkan Palembang berada di bawah perlindungan Inggris. Itulah sebabnya ketika pendudukan Belanda di Palembang dilakukan, Raffles menyampaikan protes resmi kepada Komisararis Jenderal (Woelders, 1975: 15).

Menyadari kondisinya terdesak, Najamuddin II meminta bantuan pada Inggris. Raffles menjawab permohonan ini dengan mengirimkan pasukan sekitar 200 orang di bawah Kapten Francis Salmond melalui jalur darat dari Bengkulu ke Palembang pada tanggal 22 Juni 1819. Salmond mencapai ibukota dengan pasukan pengawal sekitar 20 orang pada tanggal 4 Juli 1819 (meninggalkan sebagian besar pasukan

di Rawas). Kedatangan Solmond menimbulkan ketegangan, karena ia membuat perjanjian dengan Najamuddin II dan mengibarkan bendera Inggris di atas keraton sultan (*Kuta Lamo*). Kondisi ini diselesaikan oleh Muntinghe melalui perundingan dengan Kapten Salmund dan melucuti peralatan pasukannya, untuk selanjutnya mengirim mereka kembali ke Bengkulu melalui Batavia.

Akibat dari tindakan Najamuddin II mengundang pasukan Inggris, maka ia dan putera tertuanya serta pengikutnya dibuang ke Batavia dan di tempatkan di Cianjur. Kekuasaannya diserahkan kepada Badaruddin II sepenuhnya. Segera setelah Salmund meninggalkan Palembang, Muntinghe bersama-sama dengan pasukan Badaruddin II mengirim ekspedisi militer untuk mengejar induk pasukan Inggris yang bermarkas Muara Beliti di bawah Letnan Haslam dan memaksa mereka mundur. Ekspedisi yang dipimpin oleh Muntinghe ke Muara Beliti, sesampainya di sana ternyata daerah tersebut telah dikosongkan oleh orang-orang Inggris dan Muntinghe memutuskan kembali ke Palembang (Woelders, 1975: 15).

Sekembalinya Raffles dari perjalanan propaganda melalui pedalaman Padang ke Fort Marlborough, ia mendengar kegagalan ekspedisi pertama, Raffles kemudian menyiapkan ekspedisi baru sebanyak 400 orang untuk dikirim ke Palembang dengan tujuan menolong misi Salmund di bawah pimpinan Hayes. Mendengar adanya ekspedisi kedua dari Bengkulu, maka reaksi Muntinghe adalah mengirimkan serdadu ke sana. Setelah bertemu muka maka kedua belah pihak memutuskan untuk kembali ke posnya masing-masing. Dalam situasi ini

Muntinghe memutuskan untuk kedua kalinya berangkat ke Muara Bliti, dan hasil dari perundingan ini adalah Muara Beliti diserahkan kepada Belanda dan Inggris harus meninggalkan wilayah Palembang. Hal ini terjadi karena kuatnya pasukan Muntinghe, tidak sebanding dengan kekuatan pasukan Raffles dari Bengkulu (Kemp, 1898: 256-265; Woelders, 1975,15-18).

Perang Palembang (1819 dan 1921)

Dengan Dibuangnya Najamuddin II, maka kekuasaan Sultan Badaruddin II tampaknya telah pulih seperti sebelumnya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Terbukti wilayah kekuasaannya jauh berkurang, sultan hanya mendapatkan sebagian kecil wilayah dan pegawai. Wilayah yang lain menjadi milik Belanda. Badaruddin II berusaha menyusun kekuatan untuk mengembalikan wilayah tersebut ke dalam kekuasaannya. Kesempatan ini terbuka ketika Muntinghe mengejar pasukan yang ditinggalkan oleh Kapten Solmond dan ekspedisi yang dipimpin oleh Haslam di daerah Rawas selama enam bulan. Selama di pedalaman, Muntinghe dan pasukannya selalu mendapat serangan dari penduduk. Peristiwa ini dipersalahkan oleh Muntinghe pada Badaruddin II, karena penduduk yang menyerang pasukan Muntinghe adalah orang-orang yang membantu Badaruddin II selama di daerah Rawas (1812-1813). Muntinghe menuntut agar sultan memberantas para pemberontak dan menyerahkan putera mahkota yaitu Pangeran Ratu sebagai jaminan. Kondisi ini mengakibatkan situasi makin memanas karena Sultan Badaruddin II menolak menyerahkan puteranya sesuai permintaan Muntinghe. Puncaknya

terjadilah perang antara kedua kubu ini pada bulan Juni 1819. Dalam peperangan ini pasukan Belanda dapat dikalahkan kemudian mundur ke Muntok dan memblokade perairan Palembang (muara Sungai Musi). Pada bulan Oktober 1819 Belanda menyerang Palembang, guna membalas kekalahan perang bulan Juni. Dalam peperangan dahsyat ini Palembang kembali memperoleh kemenangan (Kielstra, 1920: 132; Kemp, 1900: 586-587).

Dua kali kekalahan Belanda pada tahun 1819 menyebabkan Belanda mempersiapkan suatu ekspedisi militer yang besar untuk menaklukkan Palembang. Disamping itu Belanda juga menjalankan strategi lain yaitu membebaskan Najamuddin II dan pengikutnya. Langkah selanjutnya adalah terjadi kesepakatan antara Nayamuddin II, putera tertuanya yaitu Pangeran Prabu Anom dan Belanda pada 28 April 1821 di Bogor. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa Pangeran Prabu Anom diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III, sedangkan ayahnya bergelar Susuhunan Husein Diauddin. Sultan Najamuddin III inilah yang nantinya akan didudukkan sebagai sultan Palembang setelah Palembang ditaklukkan. Ekspedisi penaklukan dipimpin Jenderal Mayor Markus de Kock⁶. Perang berkobar dari tanggal 21 hingga 24 Juni 1821, Palembang takluk dan Badaruddin II bersama-sama dengan pengikutnya dibuang ke Ternate pada 3 Juli 1821. (Woelders, 1975: 105-108;).

Kemenangan penting atas Palembang diumumkan dihadapan

⁶ Ekspedisi ini terdiri dari 18 kapal perang dengan 4000 serdadu, termasuk 1900 orang pasukan pendarat (Stapel, 1940,193-4)

pasukan di Batavia dalam perintah harian di Weltevreden yang diiringi tembakan meriam sebanyak 101 kali (Bataviaasche Courant, Rabu 11 Juli 1821). Kemenangan ini disambut antusias di negeri Belanda. Menurut mereka keberhasilan gemilang tersebut sangat penting bagi keberadaan politik Hindia Belanda di wilayah koloni ini. Seperti yang dilontarkan oleh Mr.D.F. Van Alphen di Majelis Rendah Parlemen Belanda “bahwa baru sekarang pemulihan dan penguatan kekuasaan kita di Hindia bisa dianggap sebagai suatu kenyataan” (Kielstra, 1892: 99).

Selanjutnya kekuasaan sultan di Palembang hanya sebagai lambang, karena sepenuhnya sudah dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Kesimpulan

Masa pemerintahan Sultan Machmud Badaruddin II adalah masa terakhir Kesultanan Palembang berdiri sebagai kesultanan yang berdaulat. Pada masanya Palembang dihadapkan pada tiga kali peperangan. Dua kali peperangan terjadi pada tahun 1819 dengan Belanda, yang berakhir dengan kemenangan di pihak Palembang. Dengan bekal inilah Belanda mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk menguasai Palembang dan usaha ini berhasil dalam peperangan yang terjadi tahun 1821.

Daftar Pustaka

- ANRI, Memorie van den herr H.W. Muntinghe over het Bestuur van Palembang 16 Februarie 1827, Bundel Palembang No. 70.3.*
- Veth, P.J., 1869, *Aardrijkskundige Woordenboek van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, P.N. van Kamp.

Java Government Gazette, Sabtu, 30 Mei 1812.

Bataviasche Courant, Rabu tanggal 11 Juli 1821.

Djoko Marihandono, 2006, *Sentarlisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Wiliem Daendels di Jawa 1808-1811 Penerapan instruksi Napoleon Bonaparte* (disertasi yang belum diterbitkan), Depok: Program Ilmu Sejarah Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pngetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Ricklefs, M.C., 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern* (Terjemahan *Modern Sosiological Theory*), Jakarta: Prenada Media.

Sevenhoven, J.L. van, 1971, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*, (Terjemahan *Beschrijving van de Hoodplaats van Palembangsche*), Jakarta: Bhrata.

Woelders, M.O., 1975, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, Leiden: VKI Publ. No.72.

Kielstra, E.B., 1892, *De Ondergang Van Het Palembangsche Rijk*, dalam *de Gids*.

Stapel, F.W., 1940, *Geschiedenis van Nederlandsch Indie, vijfde deel*, Amsterdam: Joost van den Vondel.